

## **Bab II**

### **MEDIA ONLINE DAN FEMINISME**

#### **2.1. Industri Media Online**

Media massa banyak mengalami kemajuan dalam berbagai hal, termasuk industri dan juga teknologi. Pada tahun 1970-an, media massa mengalami pergolakan, khususnya media televisi. Hal ini disebabkan karena munculnya media lain berupa media online. Dan pada tahun 1999, terjadi perkembangan industri teknologi dengan ditambahkannya Microsoft ke Dow Jones Industrial Index dan menjadi sektor paling penting dalam perekonomian AS (Rod Carveth, 2004: 265). Industri media online yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Internet sangat berkembang pada abad 21.

Internet adalah hasil silangan teknologi komunikasi, menawarkan pengguna dengan meningkatkan fungsi saluran komunikasi. Internet sangat fleksibel dan interaktif. Dan internet terus berkembang sering dengan perkembangan zaman. Selama dua dekade pertama, internet tidak menjadi media massa sampai munculnya World Wide Web yang diperkenalkan dengan *hypertext* (HTML) pada tahun 1989, dan pertengahan 1990-an banyak sekali *website (web) browser* yang bermunculan.

Internet menciptakan perubahan yang bersifat internal, tidak eksternal, seperti teknologi (XML mengambil alih dari HTML *software: File swapping* program), politik dan peraturan (perpajakan undang-undang: variasi antara hukum nasional), dan terutama ekonomi (yang mulai dari akhir konten gratis). Faktor-faktor tersebut

membantu perluasan lebih lanjut dari Internet, kemungkinan besar dengan memperkuat dasar keuangan yang masih hidup di perusahaan.

Faktor yang berkontribusi pertumbuhan Web, pertama yaitu teknologi, infrastruktur dan peralatan yang sudah didistribusikan secara luas di seluruh dunia, terutama telpon dan komputer. Dan kedua, web memiliki multifungsi dalam memperoleh informasi, komunikasi dengan banyak orang dalam satu grup, berbelanja, email, *streaming*, dan banyak lagi lainnya. Media sebelum internet akan bertahan dengan beberapa perubahan. Meski konten dan fungsi mereka tetap sama namun mode transmisi dan distribusi akan berubah drastis. Perubahan ini menyebabkan konvergensi teknologi ini terjadinya, tidak hanya itu saja tetapi *merger* antar satu media dengan media lainnya juga.

Koran yang awalnya hanya menggunakan internet untuk mempromosikan koran itu sendiri sampai koran tersebut menambahkan beberapa elemen baru sehingga terciptanya media baru. Koran akan menjadi koran digital yang disampaikan melalui internet. Tidak hanya koran tetapi buku pun juga mengalami hal yang sama di mana banyaknya *e-book* yang dapat diunduh melalui internet. Sedangkan *streaming* siaran radio banyak digunakan saat orang menghabiskan waktu kerja dan waktu luang mereka. Namun televisi berbeda, ini disebabkan karena televisi bisa diakses melalui *streaming* dan juga program televisi dialirkan melalui layar komputer. Adaptasi media seperti koran, radio, dan televisi mengambil bentuk konvergensi untuk

memberikan multifungsi yang *platform* multimedia dapat bersaing atas dasar persamaan dengan media online.

Media lama beradaptasi dengan media online dengan melakukan segala bersama-sama. Dengan demikian media lama seperti koran, radio dan televisi tidak akan hilang. Internet memiliki penonton lebih banyak atau lebih luas. Media cetak merupakan media yang sangat terpengaruh atas perkembangan media online, karena banyak pasar mereka beralih ke media online. Hal ini terjadi karena menjadi fakta bahwa telekomunikasi telah menjadi bagian dari hidup dan sumber sosial untuk mempromosikan dan memperluas ruang publik (Patricia Aufderheide, 1997: 157).

Secara prinsip media online sama dengan media cetak, namun terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya. Media online tidak terbatas dalam hal jumlah halaman seperti halnya media cetak. Namun demi alasan kecepatan akses, keindahan desain, tingkat keterbacaan dan alasan-alasan lainnya, perlu dihindarkan penulisan naskah yang terlalu panjang. Mekanisme dalam prosedur naskah cenderung lebih simpel karena media online mengejar kecepatan. Proses editing sekaligus publishing sering dilakukan oleh bagian yang sama. Mekanisme editing juga bisa dilakukan ketika sudah dipublish.

Terlebih juga media online bersifat real time sehingga proses publikasi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dapat memuat berbagai macam model multimedia dan mendukung interaktifitas antar user. Banyak media online yang

muncul tanpa membutuhkan organisasi resmi. Ciri lain adalah relatif lebih terdokumentasi karena online.

Ada beberapa perusahaan media Internasional yang juga menggunakan media online serta media cetak sekaligus seperti AOL (*America Online*), MNS (Portal milik microsoft), *Prodigy*, *CompuServe*, dan banyak lainnya. Perkembangan konvergensi media kemudian menjadikan usaha media online semakin menggurita dengan berbagai difersifikasi usaha juga melakukan penguasaan atas media lainnya. Sebagai contoh Pengusaha media Rupert Murdoch yang sudah memiliki *Fox News Channel* kemudian membeli *Time Warner*.

Maraknya perusahaan menggunakan media online juga disebabkan karena keuntungan yang akan didapat dari media online. Menurut Rod Carveth, keuntungan media online di dapat dari tiga pos yaitu; layanan pelanggan (*service subscriber*), Iklan online (*online advertising*), pembayaran konten (*pay-per-content*) (Rod Carveth, 2004: 271). Hal ini dapat dilihat dari data yang dipunya oleh AdMob. Menurut AdMob yang merupakan perusahaan yang melayani iklan untuk lebih dari 23.000 situs mobile web dan aplikasi di seluruh dunia, pertumbuhan telepon, hingga Mei 2010 setidaknya ada 10 juta permintaan dari 92 negara ke AdMob. Jumlah ini mengalami peningkatan 27 negara jika dibandingkan dengan Mei tahun 2008.

Data ini diperkuat oleh Laporan penelitian *Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism*. Lembaga ini melaporkan bahwa 46 persen warga Amerika

yang mereka survei mengatakan mereka mendapatkan berita online setidaknya tiga kali seminggu. Hanya 40% persen warga Amerika yang mendapatkan berita dari koran dan situs pendamping media mereka (Nur Haryanto, 2011).

Perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi dari media cetak ke media online berpengaruh terhadap aliran iklan. Berdasarkan laporan dari *Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism*, pada tahun 2010 pendapatan iklan media online menyalip pendapatan iklan di media cetak. Pendapatan iklan koran pada tahun 2010 turun 46 persen dalam empat tahun, atau sekitar US\$ 22,8 miliar. Di sisi lain, iklan online mencapai US\$ 25,8 miliar pada tahun 2010.

*The New York Times*, mencoba untuk mengenakan biaya untuk mengakses web mereka. Pembaca *The New York Times* hanya bisa membaca 20 artikel secara gratis, dan selebihnya mereka harus membayar untuk membaca. Surat kabar utama lainnya juga telah memulai petualangan "membayar" dengan hasil yang beragam *The Wall Street Journal* dan *Financial Times* lakukan berhasil, dengan masing-masing 400.000 dan 200.000 pelanggan pada tahun 2010 .

Potensi mendapat keuntungan dari "membayar" cukup besar. Berdasarkan survei *Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism*, 23 persen orang Amerika yang disurvei mengatakan bahwa mereka akan membayar \$ 5 per bulan untuk versi online jika koran lokal mereka tidak ada lagi. Model ini sangat mendekati media ke dalam model bisnis media yang berorientasi keuntungan

kapital. Dalam mencapai kondisi tersebut, media online setidaknya harus melewati tantangan berupa; tingkat persaingan, ancaman pengganti, kekuatan relatif dari pembeli, kekuatan relatif pemasok, dan barriers masuk (Rod Carveth, 2004 : 271).

### **2.1.1. Kemunculan Media Online**

Kemunculan dan pertumbuhan media online sangat patut diperhitungkan. Awal mula terbentuknya sosial media terjadi pada tahun 1978 dari penemuan sistem papan buletin, yang dapat memungkinkan kita untuk mengunggah, atau mengunduh informasi, dapat berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik yang koneksi internetnya masih terhubung dengan saluran telepon dengan modem. Sistem papan buletin ini ditemukan oleh Ward Christensen dan Randy Suess yang keduanya adalah sesama pecinta dunia komputer. Perkembangan sosial media pertama kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA (Advanced Research Project Agency) pada tahun 1971 (dalam Rod Carveth, 2004: 266).

Media online merupakan bagian dari media massa yang sangat berkembang belakangan ini. Media pertama yang muncul adalah media cetak yaitu pada tahun 1600, mesin cetak Gutenberg laris dikalangan masyarakat. Surat kabar dapat di baca oleh kalangan masyarakat. Dan selanjutnya disusul dengan radio pada tahun 1878 yang pertama mengirim dan menerima gelombang tersebut adalah David E. Hughes. Setelah itu muncullah televisi pada tahun 1927 dengan adanya kiriman sinyal televisi

dari London ke Glasgow dan pada 1928 dari London ke New York oleh John Logie Baird.

Pada zaman 1900-an dampak perkembangan cepat dari media cetak sangat terasa. Bahkan sudah ada gagasan untuk mengkombinasikan surat kabar ke dalam media massa komunikasi lainnya. Ada dua hal penting yang perlu dicermati dalam era ini. *Pertama*, media surat kabar dan juga media cetak lainnya bisa muncul setelah seperangkat kompleksitas elemen budaya muncul dan terus berkembang di masyarakat. *Kedua*, seperti hampir terjadi pada semua penemuan sebelumnya, penemuan mesin cetak merupakan gabungan elemen dalam masyarakat. Masyarakat menerima perkembangan media cetak karena tidak lain sebagai sebuah kompleks budaya yang terus berkembang.

Pada akhir abad ke-19 menjadi jelas munculnya beberapa bentuk media cetak seperti surat kabar, buku, dan majalah yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Media tersebut mewakili bentuk baru komunikasi yang memengaruhi tidak hanya pola interaksi didalam komunitas dan masyarakat, tetapi juga pandangan psikologis.

Pada permulaan abad ke-20, masyarakat barat melakukan percobaan untuk mengembangkan teknik komunikasi yang paling luas. Sepanjang masa pertama dekade abad ke-20 *mootion picture* menjadi media hiburan keluarga. Ini diikuti pada tahun 1920-an dengan pengembangan radio rumah tangga dan pada tahun 1940-an dengan dimulainya televisi rumah tangga. Bahkan pada awal tahun 1950-an radio

telah mengalami titik jenuh pada keluarga Amerika. Radio berkembang lebih cepat dengan melakukan penetrasi yang kian meningkat dalam bentuk radio kamar tidur dan dapur dengan didukung pertumbuhan sejumlah menara pemancar. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an televisi juga mengalami titik jenuh. Pada tahun-tahun selanjutnya, media baru ditambahkan seperti vidiotek, televisi kabel, dan sebagainya. Komunikasi massa menjadi satu hal penting dan menjadi bagian dalam kehidupan modern ini.

Komunikasi elektronik media massa dipaksa berkembang lebih cepat lagi dengan munculnya internet sebagai bahan dari media massa. Internet telah mampu mengatasi ruang dan waktu proses penyebaran informasi di dunia ini. Apalagi internet kemudian diintegrasikan dengan media massa lain seperti televisi, radio dan media cetak, bahkan media massa selain internet itu pada akhirnya membutuhkan internet sebagai alat penyebaran informasi pula. Hal itu dapat terjadi karena kemampuan manusia yang terus melakukan pengembangan, eksplorasi, dan penelitian demi kemajuan di bidang teknologi komunikasi massa.

Sketsa singkat peralihan utama di dalam kemampuan orang-orang untuk berkomunikasi menunjukkan dua faktor utama. Pertama, “Revolusi” komunikasi sedang terjadi sepanjang keberadaan manusia. Masing-masing menyediakan sebuah alat perubahan penting yang dapat dibawa untuk memikirkan diri manusia, organisasi masyarakat, dan akumulasi budaya. Kedua, pertumbuhan media massa telah terjadi

dengan saat luar biasa akhir-akhir ini. Bahkan, banyak peristiwa utama di dunia ini berlangsung seumur hidup manusia yang tidak lepas dari media elektronik.

Bahkan saat ini banyak terjadi peralihan dari media cetak ke media online. Di mana koran-koran yang ada sekarang ini pasti mempunyai *website* online untuk memberikan informasi yang lebih cepat kepada masyarakat. Tidak jarang pula pemilik media saat ini hanya membuat *website* online saja untuk memberikan informasi sekaligus berbisnis meskipun tidak memiliki media cetak. Seperti yang dilakukan oleh detik.com yang merupakan pelopor media online pertama di Indonesia. Sehingga muncullah media online lainnya yang sejenis.

Perkembangan media cetak dari masa ke masa mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Pada tahun 1833, Bunyamin Day meluncurkan surat kabar *New York Sun* secara besar besaran. Semenjak itu, masyarakat dunia mulai mengenal media cetak dan mendapatkan berbagai informasi melalui media cetak. Menurut Denis McQuil (1987:1), media cetak digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan budaya, seni, simbol, pengembangan mode, norma-norma, gaya hidup, dan tata cara. Kita mengenal media cetak yang menggunakan teknologi analog kita sebut media konvensional dan media cetak yang menggunakan teknologi digital, kita sebut dengan Media Baru. Menurut ramalan Philip Meyer (2009) dalam bukunya yang berjudul "*The Vanishing Newspaper*", koran akan punah pada tahun 2040.

Banyaknya pemilik media cetak yang melakukan *merger* dengan media online karena melihat prediksi bahwa media cetak seperti koran akan mati karena adanya media online. Hal ini diperkuat lagi oleh adanya penurunan beberapa oplah dari media cetak yang sudah lama ada. Bahkan ada beberapa media cetak tutup atau gulung tikar karena oplah yang dihasilkan tidak mencapai target yang diinginkan, dan malah lebih cenderung perusahaan mengalami kerugian. Terlebih media online saat ini sangat diminati oleh kalangan muda. Bisa dilihat dari pengguna media online yang terus meningkat dari tahun ke tahun di seluruh dunia. Sedangkan di negara barat, koran tidak lagi diminati, sehingga diberikan secara gratis di bis atau kendaraan umum.

Media cetak di Eropa perkembangannya semakin tidak bagus, oplah koran di Rumania merosot tajam pasca krisis ekonomi dari 1 juta eksemplar menjadi 40 ribu eksemplar. Hal ini dipengaruhi langsung oleh perkembangan teknologi digital, khususnya perkembangan internet. Pada tahun 2011, jumlah pengguna internet lebih kurang 2,2 Miliar orang, atau sama dengan 1/3 jumlah penduduk dunia. Indonesia tercatat sebagai negara pengguna internet terbesar ke-8 dunia, lebih kurang 22,1 %, dari jumlah penduduk. Kalau dicermati pengguna internet di Indonesia sebageian besar berada di perkotaan, namun saat ini masyarakat di perdesaan sudah banyak yang menggunakan internet. Warung internet menjamur sampai ke seluruh pelosok tanah air. Perkembangan teknologi komunikasi seperti smartphone mempengaruhi

cara orang berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Informasi dengan cepat dan mudah diakses masyarakat.

Salah satu contoh perkembangan teknologi pada media cetak saat ini adalah *E-Magazine* dan juga *E-Newspaper*. *E-Magazine* adalah majalah elektronik pada awalnya merupakan majalah yang didistribusikan melalui online. Selanjutnya berkembang dengan versi masing-masing, memiliki karakteristik dan konten tersendiri. Perkembangan majalah elektronik mengikuti perkembangan teknologi media elektronik seperti komputer, *smartphone* yang memiliki spesifik tersendiri. Majalah elektronik harus mengikuti perkembangannya agar dapat merebut konsumen disegala lini. Majalah elektronik memiliki dua tampilan yaitu edisi replika dan edisi online. Edisi replika, mempublikasi utuh majalah seperti versi cetak, ditampilkan dalam format PDF. Sedangkan edisi online ditampilkan dengan pengkategorian dengan harapan pembaca dapat memilih informasi sesuai yang diperlukan.

Sedangkan *E-Newspaper* adalah koran berbentuk digital dapat dibaca melalui media elektronik, seperti komputer dan *smartphone*. Dikenal juga dengan nama media online. Koran digital lahir sebagai wujud dari perkembangan teknologi. Perkembangan internet mempengaruhi media cetak termasuk koran. Internet mulai dikenal masyarakat dunia pada tahun 1982. Koran nasional pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi digital adalah koran “Kontan” pada tahun 2008 Teks halaman. Disusul Harian Kompas, Koran Tempo, Republika, Media Indonesia, The Jakarta Post, dan Jawa Pos.

Tiada pilihan lain, Industri media cetak yang konsumennya bergeser ke media baca digital harus mengambil langkah–langkah strategis untuk merebut pangsa pasar yang mulai berkurang. Dari hasil survei di Amerika dan Eropa media cetak analog, konsumennya mulai berkurang bahkan ada yang tutup. Di Rumania oplah Harian Nasional merosot dari 1 Juta eksemplar menjadi 40 Ribu eksemplar. Menurut survei Nielsen Media Research selama 5 tahun, oplah koran di Indonesia turun dari awal tahun 2005 mencapai 28% menjadi 18% pada tahun 2009. Untuk menjaga stabilitas dan eksistensinya, harian Kompas sebagai media konvensional tersohor melakukan ekspansi ke media digital dengan meluncurkan Kompas.com, *mobile SCOOP* tersedia di *platform* Android dan iOS, Kompas Editor’s Choice untuk pembaca yang menggunakan *iPad* dan *Blackberry PlayBook* untuk pengguna *Blackberry*. Selain itu Kompas mengeluarkan koran elektronik ‘KOMPAS Reader 1.0. Kompas sebagai koran terbesar oplahnya, sekitar 500 ribu eksemplar per hari dan menjadi koran ternama nomor 103 dunia. Antisipasi yang dilakukan manajemen Kompas dapat mempertahankan konsumen koran analog atau koran cetak dengan memelihara hubungan dengan konsumennya di media digital Kompas. Mereka tetap membaca Kompas di media digital dan tentunya juga membeli koran. Pangsa pasar dapat dijaga agar tidak lupa dengan koran Kompas.

Media cetak konvensional memiliki konsumen tersendiri dikalangan generasi tua dan media cetak digital memiliki segmen pada generasi muda dan kaum intelektual yang akrab dengan teknologi digital. Industri media cetak harus pandai–

pandai menentukan strategi dan menyiapkan SDM yang profesional dalam mengelola media. Selain itu, beradaptasi setiap saat terhadap perkembangan teknologi yang berkembang dengan cepat.

### **2.1.2. Perkembangan Media Online di Indonesia**

Internet di Indonesia muncul pada tahun 1990-an, yang dimulai oleh Majalah Mingguan Tempo pada 6 Maret 1996 supaya Tempo tidak mati akibat dibredel (J. Heru Margianto dan Asep Syaefullah, 2012: 16). Namun media online menjadi lahan bisnis saat detik.com muncul. Detik.com dibentuk sudah sejak 30 Mei 1998 oleh Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman dan Didi Nugrahadi, namun *www.detik.com* baru mulai *online* dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998.

Momen perubahan sosial politik tahun 1998 menggerakkan Budiono yang sebenarnya sempat menganggur sebagai “jurnalis” selama beberapa tahun untuk membuat sebuah media baru yang tidak mudah dibredel dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus menunggu cetak besok pagi. Detik.com merupakan portal berita pertama di Indonesia yang benar-benar menjual konten dan menerbitkan informasi secara *update* dan *real time*. Dan hingga saat ini masih banyak diakses serta ditiru oleh berbagai perusahaan lain. Pertumbuhan internet menjadi persaingan bagi media cetak.

Detik.com adalah media online berupa portal berita pertama di Indonesia yang benar-benar menjual konten dan menerbitkan informasi secara *update* dan *real time*.

Hingga saat ini, detik menjadi portal yang paling banyak diakses. Keberhasilan Detik.com kemudian ditiru oleh berbagai perusahaan lain. Seperti juga di internasional, di Indonesia pertumbuhan internet dan media online menjadi pesaing bagi media cetak. Sebagai bentuk reaksi, banyak media cetak yang kemudian juga membuat portal berita dalam versi online. Muncul kompas *cyber*, media indonesia dan lain-lain. Juga muncul portal pesaing Detik.com seperti Okezone.com, Vivanews.com dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada tahun 2009 jumlah pengguna internet seperti yang dimuat dalam detik.com mencapai 45 juta. Angka ini tentu saja menggiurkan dari segi bisnis. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Harris Thajeb mengatakan pihaknya saat ini membidik media online karena memiliki potensi yang cukup besar dan tahun ini diperkirakan tumbuh 11-12 persen. Menurutnya, selama 2010 nilai belanja iklan se-Indonesia total mencapai sekitar Rp 65 triliun. Dari jumlah itu, nilai belanja iklan di media online baru sekitar 1-2 persen. Namun nilai belanja iklan di media internet pada 2011 diperkirakan tumbuh sekitar 11-12 persen dari nilai belanja iklan di seluruh media se-Indonesia (Team News, 2011). Sedangkan saat ini berdasarkan data, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), selama tahun 2014 jumlah pengguna internet mencapai 88,1 juta. Selama tahun 2014, pengguna internet di Indonesia mengalami penetrasi 34,9 persen dari sebelumnya yaitu sekitar 71,9 juta (Goenawan, 2015).

Tidak hanya pendapatan dari Iklan, beberapa media online juga mulai mencoba mengenakan biaya bagi pengakses web mereka. Salah satu media yang melakukannya adalah *e-paper* Kompas. Hal ini senada dengan yang terjadi di luar negeri di mana media online di Indonesia juga mulai bergerak ke arah media online yang kapitalistik. Pertumbuhan internet yang spektakuler ini menunjukkan bahwa industri media massa yang paling potensial. Tingginya penetrasi pengguna internet di Indonesia dipicu oleh luasnya ekspansi teknologi internet dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui perangkat komputer atau *mobile*, dengan harga yang murah (Nastiti, 2011: 19).

### **2.1.3. *Merdeka.com* sebagai sebuah Industri**

*Merdeka.com* adalah hasil dari kolaborasi antara media dan teknologi. Kebanyakan media online dibangun sebagai bagian dari pengembangan perusahaan media, atau dibangun oleh orang-orang media. Tetapi *Merdeka.com* justru dibangun oleh perusahaan teknologi yang terdiri dari orang-orang yang mengerti PHP dan *Apache/FreeBSD* lebih dulu daripada ilmu jurnalistik.

*Merdeka.com* berdiri pada tanggal 21 Februari 2012 oleh Eka Wiharto. Media online ini berdiri di bawah naungan PT. Integra Ventura. Situs merdeka.com adalah *www organization*, yaitu organisasi yang hidup di internet. Internet hidup, berkembang, dan memberi inspirasi, di mana *Merdeka.com* menjadi bagiannya dan memberi kontribusi, terutama untuk internet Indonesia. Berangkat dari pengalaman

KapanLagi.com yang berusaha menjadi *a pure internet player* (yaitu organisasi yang berfokus pada menyediakan layanan di internet yang bisa dinikmati oleh jutaan orang) dan kemudian bermetafor menjadi perusahaan teknologi dan media dengan fokus di entertainment, kini grup ini membuat media online baru yang bergabung dengan orang-orang jurnalistik. Sinergi orang teknologi dan jurnalis itulah maka lahirlah *Merdeka.com*.

*Merdeka.com* memang bukan yang pertama tetapi para pekerja di *Merdeka.com* punya mimpi baru yakni merdeka berkreasi: Bagaimana menyajikan informasi yang sebenarnya dan enak dinikmati. Di *world wide web* (www) yang sangat luas, perlu ada informasi yang harus benar, cepat disajikan, cepat dapat diakses, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Situs *Merdeka.com* adalah *www organization*, yaitu organisasi yang hidup di internet (orang-orangnya hidup, berkarya, bisa di-googling, dan dapat berbicara di internet) bahkan menghidupi keluarganya dari internet. Internet hidup, berkembang, dan memberi inspirasi, di mana *Merdeka.com* menjadi bagiannya dan memberi kontribusi, terutama untuk internet Indonesia.

*Merdeka.com* mempunyai logo yang berwarna-warni adalah warna kebebasan dalam menyampaikan informasi, tidak terikat oleh paham tertentu atau kepentingan tertentu. Tetapi dasar yang putih (atau hitam, di saat tertentu) mendasari itikad untuk selalu ada di jalur yang benar, bukan seenaknya sendiri. Tujuannya adalah menjadi sebuah media yang bisa diakses jutaan orang melalui teknologi, tanpa batasan atau

dibatasi, karena tidak ada yang lebih berharga dari pada menjadi merdeka (tanpa dot com).

*Merdeka.com* memiliki visi, merdeka berkreasi yaitu bagaimana menyajikan informasi yang sebenarnya dan enak dinikmati. Sedangkan misi *Merdeka.com* adalah cepat dalam menyajikan berita dari media online lainnya, dapat mengakses situs merdeka.com dengan cepat, serta berita yang disampaikan akurat dan sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan saat ini situs berita online sangat berpengaruh terhadap kecepatan masyarakat dalam memperoleh berita. Dari data yang dihimpun oleh Nielsen, situs *Merdeka.com* berada pada posisi ketiga yang bersaing dengan situs berita online lainnya seperti detik.com dan metrotivi.com.

*Merdeka.com* yang memiliki tagline “*Let’s be smart*” ini didirikan karena adanya peluang bisnis yang menjanjikan dan pemiliknya ingin memberikan kontribusi dalam hal perkembangan Indonesia. Jika dilihat dari latar belakang sang pendiri yang merupakan seorang pembisnis. Media online ini menjadi tempat yang sangat tepat dimanfaatkan untuk ajang bisnis. *Merdeka.com* juga merupakan media yang sama dengan *detik.com* yang tidak memiliki media cetak. *Merdeka.com* ada setelah *Kapanlagi* yang merupakan media *infotainment* yang memiliki *rating* tinggi. Tidak seperti beberapa media online lainnya yang lahir karena adanya media cetak terlebih dahulu. *Merdeka.com* mengikuti jejak detik.com yang hanya memiliki media online saja.

## 2.2. Gerakan Feminisme

Gerakan perempuan atau gerakan feminisme mulai menjamur di berbagai tempat di belahan dunia pada akhir abad ke-19, awal abad 20. Gerakan ini memperjuangkan emansipasi, perubahan dan persamaan kedudukan serta keadilan sosial. Tujuan gerakan ini fokus pada isu mendapatkan hak pilih dalam memberikan suara, hak-hak yang sama, status hukum dan kesempatan akan pendidikan dan kerja.

Namun para feminis religius tidak didukung oleh pemikir perempuan yang pada waktu itu sudah mulai mengajar pada sekolah-sekolah perempuan. Hasil gerakan ini berkembang sebagaimana hak pilih yang dimiliki dari suatu negara ke negara lain dan menghasilkan persamaan kedudukan bagi perempuan. Pada tahun 1920 gerakan feminisme seperti tenggelam. Kedudukan perempuan pada tahun 1950-an dianggap ideal sebagai ibu rumah tangga, walaupun pada periode tersebut sudah banyak aktif bekerja di luar rumah. Gerakan feminisme mendapatkan momentum pada tahun 1960-an yang memberikan kejutan besar dengan memberikan kesadaran baru, terutama peranan tradisional perempuan ternyata menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, yaitu subordinasi perempuan.

Di Amerika Serikat, gerakan ini memiliki tantangan keras terutama dari kalangan konservatif ekstrem yang menuduh gerakan ini menggoncangkan kestabilan sosial Amerika Serikat. Gerakan ini dianggap sebagai gerakan *anti children* dan *anti future* karena adanya pernyataan dari gerakan tersebut bernada ekstrim, seperti “ibu

rumah tangga adalah perbudakan perempuan”, “heteroseksual adalah perkosaan”, bahkan penyaranan yang dianggap paling radikal adalah anti pernikahan, yang dianggap oleh kalangan feminis merupakan awal perbudakan dan munculnya domestikasi perempuan (Lubis, 2006: 77).

Gerakan feminisme gelombang kedua di Amerika mulai mendirikan berbagai organisasi dan melakukan protes atau kritik atas budaya. Kaum perempuan Kristen di Amerika Serikat, memulai kembali perjuangan mereka untuk bisa ditasbihkan di gereja. Dan kaum perempuan lama kelamaan menjadi sadar bahwa jenis pekerjaan, tujuan dan dimensi kerohanian dan moral kehidupan tidak sekedar dipolakan menurut pola kaum laki-laki. Kebanyakan perempuan, baik secara biologis maupun kultural yang memusatkan kehidupan mereka pada kelahiran anak dan mengembangkan hubungan.

Banyak buku-buku dan artikel mengenai studi perempuan tentang spiritualitas perempuan, prosa dan puisi yang muncul pada tahun 1980an dan awal 1990an. Perspektif perempuan saat itu menguji agama-agama besar di dunia yang menunjukkan bahwa tempat tradisional kaum perempuan dalam agama telah mengalami dan menggarisbawahi bentuk-bentuk teologi baru yang menentang kebiasaan-kebiasaan yang menindas saat ini (Lubis, 2006: 78). Agama atau kerohanian kaum perempuan menunjukkan mulai adanya gerakan feminisme gelombang ketiga. Para perempuan berusaha mengumpulkan kekuatan sebagai perantara dan setara di dalam semua tingkat hidup dan pekerjaan. Kaum perempuan

sadar bahwa situasi dari seluruh pengetahuan yang ada memungkinkan mereka untuk berani menyatakan pemahaman mereka dan sekaligus menolak pemahaman spiritualitas yang berorientasi pada dunia kaum laki-laki.

Adanya penolakan untuk gerakan feminisme yang dilakukan oleh kaum *fundamentalisme* dan *revivalisme*. Bagi kaum *fundamentalisme* di Amerika Serikat, keluarga merupakan simbol utama dari pranata moral ideal dan bentuk ideal keluarga yang merupakan prioritas tertinggi dari agenda sosial kalangan ini. Dan mengarahkan kepada pembatasan nilai-nilai peranan perempuan di sektor domestik dan peran-peran tradisional. Misi utamanya adalah penguatan sistem patriarki laki-laki sebagai pusat kekuasaan, dan perempuan sebagai yang dipimpin dan dikuasai.

Gerakan feminisme tidak hanya terjadi di Amerika, tetapi juga di beberapa negara di Eropa, bahkan di Chili dan negara lainnya. Gerakan feminisme di Chili muncul untuk melakukan kritik atas kediktatoran Pinochet. Mereka menyerukan slogan "demokrasi dalam negara dan demokrasi dalam rumah tangga." Slogan senada: "Demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi" diserukan oleh kaum perempuan di Uni Soviet pada awal masa liberalisasi. Gerakan perempuan di Philipina juga memainkan peran penting dalam mengakhiri kediktatoran Marcos (Basu, 1995: 9-10).

Hensman (dalam Dewi, 2001: 11) mengatakan bahwa di Brazil, Argentina dan Chili perempuan muncul dalam arena politik ketika pemerintahan militer dan

terorisme negara telah menghancurkan semua bentuk kehidupan politik. Kelangsungan hidup organisasi perempuan dalam situasi semacam itu turut didukung oleh adanya keyakinan rezim militer bahwa apapun yang dilakukan oleh perempuan bersifat "apolitik." Karenanya ketika perempuan mengorganisasi kampanye menentang kenaikan biaya hidup atau menuntut hak-hak asasi manusia, penguasa militer cenderung lebih memberikan ruang kebebasan bagi kelompok-kelompok perempuan dibandingkan kelompok-kelompok kiri yang militan, mahasiswa atau organisasi-organisasi buruh.

Selanjutnya Hensman juga mengatakan di negara-negara Asia Selatan otoritarianisme negara mengambil bentuk fundamentalisme atau revivalisme agama yang disponsori oleh negara. Revivalisme Hindu di India dalam prakteknya menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan menggunakan simbol-simbol tradisional untuk menegaskan bahwa perempuan tidak memerlukan kebebasan. Sementara itu fundamentalisme Islam kurang lebih sama keadaannya. Undang-Undang Keluarga Islam di Asia Selatan bersifat mendiskriminasikan perempuan dan meningkatnya kekuatan fundamentalisme itu telah merebut hak-hak yang semula dimiliki oleh perempuan Islam. Sebagai contoh pada tahun 1984 *Law of Evidence* diberlakukan di Pakistan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa kesaksian seorang perempuan sama dengan kesaksian dari setengah laki-laki ketika menjadi saksi di sidang pengadilan.

Asumsi dasar bermulanya gerakan feminisme berkembang adalah adanya ketidakadilan, penindasan dan eksploitasi. Dan adanya kesamaan paham atas perjuangan perempuan demi kesamaan, egalitas, dignitas, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan. Gerakan ini telah menjadi sesuatu hal yang *mainstream* berupa gerakan perempuan kontemporer yang jika dilihat dari titik tolak pemikiran yang didasari adanya realitas budaya dan struktur yang mendapat *legitimasi teologis* dari ajaran agama yang telah sekian lama mengakibatkan perempuan berada pada posisi marginal. Dalam konteks teologis, kaum perempuan berada pada dominasi pemikiran kaum laki-laki, sehingga memunculkan corak paradigma teologis patriarki. Dalam kehidupan sosial, teologi ini melahirkan budaya patriarki, genderisme, skisme dan kebencian terhadap lawan jenis (Lubis, 2006: 80).

### **2.2.1. Feminisme Indonesia**

Gelombang pertama gerakan feminisme Indonesia muncul pada abad ke-20 saat studi dari Cora Vreede de-Stuers yang berfokus pada sistem kekerabatan dan sistem pengetahuan tentang merekonstruksi hubungan antara persoalan perkawinan dan pendidikan ini dapat mengungkapkan basis argumen kebangkitan gerakan perempuan dan nasionalisme. Dari segi studi gerakan perempuan, tulisan Cora dipublikasikan pada tahun 1960-an merupakan karya pertama orang asing yang mengungkapkan tentang perempuan Indonesia.

Cora mengkonstruksikan tentang perempuan Indonesia dalam beberapa aspek. Pertama, mengenai identitas “perempuan Indonesia” ditinjau dari asal-usul sosio-kulturalnya dan yang mencapai kesatuan pandang dalam melawan hukum perkawinan dan pembodohan terhadap perempuan. Kedua, Cora pun merekonstruksi kesadaran personal, kesadaran organisasi, hingga seluruhnya itu berujung pada gerakan perempuan nasional dalam himpunan Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) (Rahayu, 2008: x). Kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial diatur oleh tradisi, hak dan kewajiban perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Di Indonesia yang dikenal sebagai pelopor dari gerakan ini adalah R. A. Kartini. Di Indonesia, pada pertengahan abad ke 19 para pemikir perempuan berjuang untuk pendidikan, mengorganisir Kongres Perempuan Indonesia dan mencita-citakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau yang disebut kesetaraan gender dalam keluarga (Nasrasyahbani, 2000: 21). Kartini pada masa hidupnya berkontribusi dalam publikasi untuk mengobarkan semangat di antara kaum muda Indonesia melalui lusinan surat yang ditulis dan mendapatkan perhatian yang besar dari Abendanon. Tulisan-tulisan tersebut diterbitkan dalam bahasa Belanda dengan judul *Door duisternis tot licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang) dengan tujuan memberikan catatan penting bagi para perempuan muda waktu itu. Selama seabad perempuan memperoleh hak politik yang sama sampai konstitusi RI diterima tahun 1945 dan untuk mengakui gerakan feminisme yang telah mengadakan pembaharuan ini maka PBB mendirikan Komisi Kedudukan Wanita pada tahun 1948 (Lubis, 2006: 75).

Gerakan feminisme di Indonesia semakin diperkuat dengan digelarnya Kongres Perempuan Indonesia yang secara nasional pertama kali diadakan pada tahun 1928 di kota Yogyakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh beberapa organisasi perempuan di Indonesia yang sudah berdiri. Bisa dikatakan, kongres perempuan ini menjadi fondasi utama dari munculnya organisasi-organisasi perempuan di Indonesia. Setelah kongres perempuan tersebut, pergerakan feminisme yang muncul kebanyakan menentang poligini, serta praktik poligami. Salah satu organisasi yang terkenal yakni gerakan Istri Sedar, yang kemudian menjadi Gerwis (Gerakan Wanita Sosialis), dan menjadi cikal bakal dari Gerwani.

Jika dilihat lebih dalam, sama halnya dengan di luar negeri yang memiliki beberapa fase atau gelombang gerakan feminisme (*first wave, second wave, third wave*), di Indonesia pun demikian adanya. Kita bisa meruntut di awal-awal pergerakan sebelum kemerdekaan, gerakan feminisme ditujukan agar kaum wanita bisa memperoleh pendidikan seperti halnya kaum pria. Setelah itu, pada masa Orde Lama, perempuan menuntut agar mereka ikut dilibatkan dalam kebijakan elite politik. Sebelum masa Orde Baru, perempuan di Indonesia sudah terlibat dan berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan, dalam konstituante, dan berperan dalam pemerintahan demokrasi Liberal dengan dorongan aktif dari Presiden Soekarno pada waktu itu.

Pada masa Orde Baru periode 1965 hal tersebut mulai terhenti. Perempuan disingkirkan dari politik, kecuali jika dipanggil untuk peran pendukung sebagai istri

dan ibu. Politik perempuan pada masa Orde baru dipandang sebagai sesuatu yang histeris, amoral, tidak berguna dan berada “di luar kontrol sosial” (Katjasungka Nasrsyahbani, 2000: 21). Pada masa Orde Baru, dimana kita melihat kaum wanita sangat dibatasi perannya di ranah publik, menuntut agar ruang gerak mereka tidak dibatasi seperti dalam masalah memilih pekerjaan.

Pada masa Orde Baru perempuan hanya berperan sebagai pendukung karir suami dalam struktur formal. Sehingga dibentuklah organisasi seperti Darma Wanita, Persit Kartika Candra Kirana, dan organisasi para istri lainnya. Katjasungka (2000, 21) menjelaskan dalam *Panca Dharma Wanita*: “Wanita Indonesia adalah teman dan mitra suami, istri, dan manajer rumah tangga, ibu dan pendidikan bagi anak-anak, penghasil pendapatan tambahan, dan pekerja sosial warga negara Indonesia”. Implikasi dari ideologi kekeluargaan ini tidak hanya berupa pengukuhan terhadap peminggiran perempuan dari kehidupan publik, tetapi juga merupakan model alamiah dari hirarki dan kekuasaan, wujud keluarga patriarki sebagai model perilaku sosial dan ketidaksetaraan dalam kepemilikan kekuasaan dan hak-hak.

Pergerakan kaum perempuan di Indonesia berusaha memperoleh kedudukan sebagai mitra sejajar bagi laki-laki dalam pembangunan bangsa. Sejak waktu itu kaum perempuan lama kelamaan menjadi semakin sadar bahwa jenis pekerjaan, tujuan dan dimensi kerohanian dan moral kehidupan tidak sekedar dipolakan menurut pola laki-laki. Kebanyakan perempuan, baik secara biologis maupun kultural, juga memusatkan kehidupan mereka pada kelahiran anak dan mengembangkan hubungan.

Gejala seperti ini telah menjadi perhatian sentral bagi gerakan pembaharuan kebatinan di Indonesia (Lubis, 2006: 77).

Gerakan feminisme di era Reformasi yaitu gerakan feminisme di Indonesia menyuarakan tindak anti kekerasan yang kerap dialami perempuan, serta tema liberal lainnya. Pada era tahun 2000-an, terjadi perubahan dari gerakan sosial ke gerakan politik, dari jalan ke parlemen. Gerakan perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi untuk demokrasi. Pada tahun 2001 muncul presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Tahun 2003 ada UU No. 12/2003 (pasal 65 ayat 1) memuat kuota 30persen keterwakilan perempuan dan pada tahun 2004 lahir undang-undang tentang perlindungan terhadap perempuan.

Tidak hanya itu saja, saat ini telah banyak undang-undang yang membela perempuan meskipun terkadang aplikasi dari undang-undang tersebut masih sangat mendiskriminasi perempuan. Namun banyak juga keberhasilan dan capaian gerakan perempuan yang tidak lepas dari beragam faktor pendukungnya, diantaranya adalah memilih isu yang tepat yang dibutuhkan oleh publik luas sehingga memperoleh dukungan dari masyarakat, adanya aktor gerakan dan konsisten dengan isu yang dipilihnya, tersedianya arena dialog diantara sesama anggota gerakan sehingga memungkinkan terjadinya pembagian peran diantara anggota gerakan, dan pendukung lain yang tidak kalah penting bagi keberhasilan gerakan perempuan periode ini adalah teknologi yang memudahkan anggota gerakan berkomunikasi seperti handphone, email, milis, internet, facebook, twitter dan lainnya.

Gerakan feminisme di Indonesia adalah gerakan transformasi perempuan untuk menciptakan hubungan antarsesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik, dan lebih adil. Gerakan feminisme bukanlah gerakan yang untuk menyerang laki-laki tetapi merupakan gerakan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil dari sistem patriarki. Gerakan perempuan merupakan gerakan transformasi sosial yang bersifat luas, yang merupakan proses penghapusan atau penyingkiran segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dominasi, dan diskriminasi dalam sistem yang berlaku di masyarakat.

Isu-isu feminisme yang berkembang di Indonesia dari masa ke masa mengalami perubahan. Pada masa orde Lama presiden Sukarno memberikan kesempatan kepada gerakan feminisme di Indonesia dengan pengajaran tentang keperempuanan dan perjuangan kepada kaum perempuan. Namun selama Orde Baru gerakan perempuan sengaja disingkirkan. Pada masa ini perempuan diberi citra sebagai kaum ibu semata yang berada disamping bahkan dibelakang kaum laki-laki. Barulah pada era reformasi usaha memunculkan gerakan feminisme makin kuat. Feminisme bukan lagi sekedar wacana namun sebagai telah termanifestasikan dalam berbagai langkah instrumental pada struktur pemerintahan. Meskipun belum dapat menghilangkan stigmatisasi perempuan sebagai orang kedua.

Isu perempuan dan ketidakadilan gender yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan Indonesia secara sederhana dapat dibagi dalam tiga dasawarsa tahapan. Dasawarsa pertama pada tahun 1975-1985 yaitu terkait isu pelecehan. Para aktivis

LSM menganggap itu penting, namun mereka tidak menggunakan analisis gender dalam menyelesaikan masalah sehingga menimbulkan reaksi berupa konflik antaraktivis perempuan dan lainnya. Sedangkan dasawarsa kedua pada tahun 1985-1995 merupakan dasawarsa pengenalan dan pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud analisis gender dan mengapa gender menjadi masalah pembangunan. Banyak yang menganggap bahwa masa pengenalan analisis gender tersebut berkaitan dengan kurangnya kebijakan lembaga-lembaga donor, sehingga banyak sekali yang meragukan para aktivis LSM menerima isu tersebut dengan kesadaran kritis. Banyak indikasi menunjukkan bahwa penerimaan tersebut lebih merupakan formalitas belaka. Sedangkan pada dasawarsa selanjutnya lebih kepada menyiapkan strategi untuk tidak menghancurkan apa yang telah dibangun selama dua dasawarsa terakhir. Dan strategi yang diusulkan, yakni: pertama, mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi dan lembaga pendidikan dan, kedua strategi advokasi (Fakih, 2013: 160-163).

### **2.2.2. Gerakan Perempuan Aceh**

Aceh mengalami banyak kejadian besar, mulai dari konflik sampai bencana. Dan kebanyakan korban dari hal tersebut adalah perempuan. Pada tahun 2000, Aceh masih dalam suasana konflik terbentuklah *Duek Pakat Inong Aceh* (DPIA) oleh sekitar 450 orang perempuan Aceh. DPIA yang pertama dilakukan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh tanggal 19-22 Februari 2000.

Pertemuan ini menghasilkan 22 rekomendasi yang ditujukan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik Aceh dengan cara damai. DPIA membentuk sebuah lembaga untuk menaungi dan menjalankan rekomendasi yang dihasilkan. Lembaga tersebut bernama *Balai Syura Ureung Inong Aceh* (Balai Syura) dan berdiri pada tanggal 21 April 2000.

DPIA pertama merekomendasikan untuk terwujudnya perdamaian di Aceh dan melibatkan perempuan dan seluruh organisasi perempuan ada di Aceh. DPIA kedua dilaksanakan tahun 2005 setelah bencana gempa dan tsunami terjadi, rekomendasi yang dihasilkan adalah pembangunan rehabilitas dan rekonstruksi yang berperspektif gender dan memastikan keterlibatan perempuan dalam proses rehabilitas dan rekonstruksi Aceh. Sedangkan DPIA ketiga dilakukan pada Maret 2011 yang menghasilkan rekomendasi menjadikan Balai Syura sebagai rumah besar milik semua organisasi perempuan dan individu perempuan yang ada di Aceh.

Perempuan Aceh dapat bermusyawarah dan berkiprah dengan diwadahi oleh Balai Syura. Karena visi dari Balai Syura adalah mewujudkan kehidupan perempuan Aceh yang bermartabat, berkeadilan dan damai, menegakkan Syariat Islam yang mengakomodir tafsir dan pelaksanaan yang berpihak kepada perempuan, menerapkan adat istiadat yang relevan untuk kemajuan perempuan dari segala sisi kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Visi tersebut diimbangi dengan misi mengembangkan kondisi yang kondusif bagi kehidupan yang aman dan damai, mengkaji dan mengembangkan Syariat Islam, memastikan terpenuhinya hak-hak dasar perempuan dan hak perempuan korban, peningkatan peran serta dan posisi perempuan dalam politik serta revitalisasi adat dan budaya yang berpihak pada perempuan. Balai Syura sah menjadi perkumpulan dengan akta bernomor 4 pada tanggal 4 Juli 2000 yang didaftarkan di notasi H. Nasrullah, SH. Organisasi ini berpegang atas nilai besetaraan dan keadilan, kekeluargaan, independensi, anti kekerasan, non diskriminasi, demokrasi dan pluralitas.

Salah satu fokus isu Balai Syura yang dibahas pada DPIA II dan DPIA III adalah pemenuhan hak perempuan korban. Pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan korban konflik sampai saat ini belum terpenuhi hak-haknya sebagai korban, baik hak atas pemulihan, hak atas keadilan maupun hak atas kebenaran. Korban konflik terus hidup dalam ketidakpastian atas hak yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga membuat sebagian besar korban pasrah dan melewati hidup dalam kondisi sulit.

Jumlah korban kekerasan di Aceh makin meningkat dari waktu ke waktu. Baik itu korban kekerasan dalam rumah tangga ataupun jenis kekerasan lainnya. Laporan tahun 2011-2013 dari Menjelujur Pengalaman Terhadap Perempuan di Aceh mencatat bahwa pada tahun 2011 ada 263 kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak perempuan dan meningkat menjadi 299 kasus pada tahun 2012. Dan lagi-lagi perempuan menjadi korban dalam penerapan Syariat Islam yang ditetapkan di Aceh.

Sampai saat ini pemerintah belum mempunyai rencana dan program untuk pemenuhan hak perempuan. Program yang dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan perempuan karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Bahkan hadirnya pimpinan baru di pemilukada 2012 belum memberikan titik terang bagi advokasi pemenuhan hak perempuan korban. Para pemimpin tidak memasukkan program untuk menjawab kebutuhan korban kekerasan khususnya perempuan.

Pemilu 2014 diharapkan menjadi peluang memperjuangkan pemenuhan hak perempuan korban konflik dan kekerasan. Meskipun politik di Aceh dipenuhi oleh partai yang dipimpin oleh orang-orang terlibat dalam konflik, yang menyebabkan proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi serta peradilan HAM merupakan tantangan yang sangat besar. Namun pemilu tetap harus dimanfaatkan untuk ruang advokasi yang mendukung pemenuhan hak perempuan yang menjadi korban. Salah satu caranya dengan perempuan sebagai calon legislatif agar menjadi pemimpin yang dapat membawa perubahan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan mengalami penurunan aktifitas program disebabkan oleh menurunnya konsentrasi dukungan finansial dari para pendonor dan juga terkait dukungan pemerintah atas pemenuhan hak-hak perempuan sampai saat ini hanya jalan ditempat. Tetapi komunitas yang berasal dari

kampung justru menyokong gerakan perempuan agar terus bergerak agar keterwakilan perempuan dan pemenuhan haknya dapat terjadi.

Semakin meluasnya kesadaran partisipasi perempuan di ranah publik memunculkan banyak tantangan terutama terhadap isu syariat Islam dan politik. Perempuan mengalami kendala untuk memimpin dan mengambil kebijakan karena masih tertahan dengan stigma bahwa perempuan tidak boleh memimpin. Tidak hanya stigma tersebut tetapi juga stigma beban dan peran perempuan di wilayah domestik. Dibeberapa daerah kabupaten di Aceh terkait beban antara laki-laki dan perempuan sangat kental. Perempuan selain bekerja di luar rumah seperti ke sawah mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaan di wilayah domestik merupakan konstruksi budaya turun temurun dan bukan hal yang bisa didiskusikan.

Bagi gerakan perempuan yang ada di Aceh, mereka tidak boleh hanya mengukur keberhasilan gerakan hanya dari banyaknya perempuan yang bekerja di wilayah publik. Hal ini dikarenakan bagi gerakan perempuan Aceh tidak mungkin menafikan peran domestik perempuan, dimana keberhasilan para ibu yang mendidik anak dan mengayomi keluarga di rumah menjadi bagian terpenting dari pembangunan peradaban suatu bangsa. Gerakan politik dari perempuan Aceh harus membawa kesadaran yang sangat kuat tentang aspirasi masyarakat perempuan dan diperjuangkan oleh seluruh komponen perempuan Aceh.

Salah satu perjuangan yang terlihat adalah bagaimana keterlibatan perempuan Aceh dalam memperbaiki konsep Syariat Islam di Aceh. Gerakan ini tidak lagi menolak syariat Islam, namun merumuskan konsep syariat Islam dengan alat ukur Islam humanis untuk menilai praktek pemerintahan yang Islami dan penerapan Islam yang humanis di Aceh yang tidak melulu mengatur urusan perempuan. Dan menyadari bahwa Aceh memiliki kebudayaan sendiri. Sehingga konsep syariat Islam yang didiskusikan haruslah identik dan membumi dengan konteks Aceh.

Gerakan Perempuan Aceh harus menyikapi serius terhadap dukungan dunia luar atas persoalan Aceh baik ekonomi maupun politik. Dalam partisipasi politik, Gerakan Perempuan Aceh harus benar-benar mempersiapkan siapa yang akan menjadi calon legislatif. Gerakan Perempuan Aceh harus membangun strategi untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan menjadikan kekhasan Aceh dalam hal adat dan syariat Islam sebagai satu kesatuan kultur identitas Aceh. Gerakan perempuan Aceh juga harus menjadi energi untuk perubahan Aceh yang berkeadilan, damai, bermartabat, sejahtera dan berkebijakan yang juga berpihak pada perempuan dengan membangun konsep pendidikan yang adil gender.

### **2.3. Media di Mata Feminisme**

Kaum feminis banyak mengkritik konten dari media dari berbagai aspek serta alat media. Media massa dianggap masih memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender, terutama dalam menampilkan representasi perempuan. Kenyataan ini dapat

dilihat dari berbagai citra dan teks pemberitaan, iklan, film, sinetron dan produk media massa lainnya. Yang ditampilkan adalah kondisi perempuan sebagai obyek, dengan visualisasi dan identifikasi tubuh seperti molek, seronok, seksi, dan sejenisnya.

Dalam pemberitaan kasus kriminal seperti pemerkosaan misalnya, perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang ikut andil sehingga menyebabkan kasus terjadi, bukan murni sebagai korban kejahatan kaum laki-laki. Atau jika ada kasus pelecehan maka seolah perempuanlah yang salah. Dalam beberapa narasi berita, penggunaan kosa kata masih berorientasi seksual, seperti “dipaksa melayani nafsu”, “bertubuh molek”, dan sebagainya. Dominasi pekerja media dan jurnalis laki-laki dianggap membuat media dan pers sering terjebak membuat berita atau produk dari kaca mata laki-laki.

Erik P. Bucy (2002), mengatakan perempuan dan segala stereotipnya dalam pandangan media massa adalah komoditas yang laku dijual. Media massa, di Indonesia, sebagai bagian dari lingkaran produksi yang berorientasi pasar menyadari adanya nilai jual yang dimiliki perempuan. Sejak awalnya kegiatan jurnalistik baik cetak maupun elektronik selalu didominasi pria. Beberapa pakar menyebut jurnalistik ini sebagai jurnalistik maskulin yang menggunakan pandangan dan subjektivitas pria untuk meneropong perempuan. Ini terlihat dari cover majalah didominasi gambar perempuan. Banyak produk atau jasa yang diiklankan seperti, motor, mobil, dan celana jins dalam majalah dan surat kabar juga dihiasi dengan sosok wanita cantik

berpenampilan minim. Menurut perkiraan, 90 persen periklanan memanfaatkan wanita sebagai model iklannya (Mulyana, 2008: 81).

Presenter/host di televisi Indonesia bisa dilihat pasti perempuan berparas cantik, termasuk untuk program berita sekalipun, terlepas dari kemampuannya. Berbeda dengan di Negara Barat jika dilihat presenter berita ataupun jurnalis senior yang memberikan *live report* tidak selalu mereka yang berparas cantik atau ganteng. Bahkan banyak dari mereka yang telah berusia 40 tahun keatas, atau rambut yang telah banyak beruban.

Media juga berperan membuat tubuh perempuan sebagai obyek. Tidak hanya unsur seronok atau memamerkan bentuk tubuh saja, tetapi segala hal yang menyebabkan pandangan tentang perempuan menjadi salah. Misalkan tubuh perempuan kurus digambarkan dan diterima sebagai bobot ideal seorang perempuan. Standar demikian dianggap mencerminkan penindasan atas kaum perempuan dengan menonjolkan citra yang tidak realistik tentang kecantikan. Banyak feminis yang menganut pendapat mengenai adanya hubungan antara citra media tentang tubuh perempuan yang langsing dengan perkembangan kebiasaan buruk makan seperti anoreksia nervosa (Chermin, dkk dalam Shaw, 2007: 311).

Saat industri semakin pesat dan iklan berlomba-lomba sebagai alat menjangkau konsumen, eksploitasi terhadap perempuan juga dianggap makin parah terjadi. Perempuan menjadi sangat potensial untuk dikomersialkan dan dieksploitasi,

karena posisi perempuan menjadi sumber inspirasi dan juga tambang uang yang tidak habis-habisnya. Ini karena iklan, bagaimanapun adalah sebuah produk industri yang berwajah kapitalis. Dan kapitalisme, dianggap tidak peduli dengan isu kesetaraan gender (Astuti, 2004: 316). Lambat laun fenomena ini akan menjadi sebuah pembodohan ketika semua perempuan berpendapat bahwa gambar apapun yang dilihat melalui media memberi pesan/ membentuk pola pikir, bahwa seperti itulah seharusnya perempuan terlihat (Shaw, 2007: 317). Keadaan ini dapat pula dikategorikan sebagai aplikasi teori *agenda setting*. Media seolah dapat menentukan *content* apa saja yang akan disajikan kepada *audience* wanita sebagai penonton televisi terbanyak dan “merayu” nya untuk menjadi konsumen atas semua iklan yang ditayangkan.

Banyak eksploitasi perempuan dalam pencitraan media massa tidak saja karena kerelaan perempuan, namun juga karena kebutuhan kelas sosial itu sendiri, sehingga mau ataupun tidak kehadiran perempuan menjadi sebuah kebutuhan dalam kelas sosial tersebut. Sayangnya kehadiran perempuan dalam kelas sosial itu, masih menjadi bagian dari refleksi realitas sosial masyarakatnya, bahwa perempuan selalu menjadi subordinat kebudayaan laki-laki (Bungin, 2006: 342). Namun seiring dengan perkembangan zaman saat ini gerakan feminisme dalam media sudah mulai terasa termasuk di Indonesia. Peraturan-peraturan yang lebih arif dalam melindungi perempuan, juga peran perempuan dalam media dalam menyuarakan kesetaraan gender.

#### **2.4. Syariat Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan Aceh**

Gerakan perempuan telah lahir pada sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20 tidak hanya di daerah barat tetapi juga di Indonesia. Dalam lingkup internasional, perjuangan tersebut tidak berjalan lancar. Superioritas kaum laki-laki sering muncul, terlebih dalam budaya ketimuran, termasuk Indonesia. Dari segi historis, Aceh seharusnya berhak untuk menjadi bagian dari Propinsi yang sangat memperjuangkan ini. Perempuan Aceh sering menjadi korban kekerasan fisik dan psikis ketika masa konflik berkejolak. Meski kini sudah damai namun bayang-bayang masih sering menghinggap.

Sejarah masa lalu membentuk karakter kehidupan perempuan di Aceh secara umum. Pada masa konflik ada aturan yang tidak tertulis untuk menjamin keamanan perempuan saat keluar rumah, seperti perempuan harus selalu ditemani oleh mahramnya. Jika dimaksudkan demi keamanan seharusnya laki-laki saat keluar rumah harus ditemani. Namun, ada beberapa yang menganggap bahwa perempuan keluar rumah harus dengan mahramnya itu sudah baku dan membentuk prapemahaman bahwa kondrat perempuan berhak untuk menerima kenyataan itu. Ketika ada yang berusaha membantah atau mencoba mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama maka akan dianggap melawan kearifan lokal atau menyalahi norma agama.

Tahun 2011-2012 data yang diperoleh dari LSM Jaringan Pemantauan 231 mencatat bahwa ada 1.060 kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh (Baranews, 15/9/2014). Di mana kekerasan ini didominasi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kasus intoleransi, pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) dan lainnya. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh menjadi puncak Aceh menjadi sorotan dunia Internasional. Penerapan Qanun atau Perda ini sangat memancing beragam respon di dunia baik itu positif maupun negatif. Perda tersebut banyak tidak dipahami oleh pihak luar Aceh. Bagi orang di luar Aceh adanya larangan duduk mengangkang bagi perempuan yang dibonceng di sepeda motor, adanya razia busana ketat atau mengecat celana perempuan yang dianggap tidak sesuai syariat, atau adanya penangkapan dan penghakiman massa terhadap pasangan mesum, semisal dimandikan dengan air comberan, mendapat reaksi keras dari banyak kalangan di luar Aceh.

Orang luar Aceh beranggapan bahwa pemberlakuan Qanun atau Perda berdasarkan perspektif sempit mengesankan bahwa syariat Islam cenderung menyusahkan dan serba sangat mengekang, terutama bagi perempuan. Hal ini mengiring opini publik untuk takut atas pemberlakuan syariat Islam dengan menganggap bahwa di daerah syariat Islam saja tingkat kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi dari pada daerah yang tidak memberlakukan syariat Islam.

Padahal seharusnya pemerintah Aceh memiliki kesempatan yang baik untuk menunjukkan Islam yang sebenarnya. Seharusnya Aceh bisa menjadi *trendcenter* atau *role model* Islam yang memuliakan kaum perempuan. Aceh harusnya mampu

menjadi teladan dalam membudayakan Islam yang berkemajuan melalui pemberlakuan syariat Islam yang memuliakan perempuan di era masa kini. Aceh harusnya bisa meraih momentum memelopori Islam yang melindungi hak-hak kaum marjinal, termasuk perempuan. Seperti masa dahulu saat ada Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Laksamana Malahayati, dan banyak lagi yang merupakan representasi prestasi dan pembuktian perempuan Aceh yang berkarakter agamis, humanis dan berkemajuan.

Di dalam ajaran Islam seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Assad (dalam Usman, 2011: 214) banyak yang kurang tepat dalam menafsirkan teks keagamaan, baik itu Al-Quran maupun hadits, sehingga menimbulkan tafsir yang bias gender di mana ujung-ujungnya kaum perempuan selalu menjadi obyek subordinat, kesalahan, kambing hitam, dan dinomorduakan. Padahal, Al-Quran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain.

#### **2.4.1. Hukum Syariat Islam di Aceh**

Hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Aspirasi umat Islam di Indonesia untuk menerapkan syariah Islam sebenarnya tidak pernah sirna dari waktu ke waktu. Bahkan selepas era Soeharto yang represif, aspirasi umat itu makin bergelora.

Sebagai bukti misalnya, setelah berlaku UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah beberapa bagian syariah Islam mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Selain di propinsi Aceh, sebagaimana elemen syariah diformalisasikan melalui peraturan daerah di beberapa propinsi lain, seperti di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur), Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur (Kabupaten Pamekasan) (Yusanto, 1).

Sejarah Aceh dan Indonesia telah menempatkan masyarakat Serambi Mekkah pada posisi yang khas, dan kekhasan tersebut lebih-lebih lagi dalam soal agama. Syari'at Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Hampir seluruh tatanan kehidupan keseharian masyarakat diukur dengan standar ajaran Islam, dalam artian merujuk pada keyakinan keagamaan, walaupun mungkin dengan pemahaman-pemahaman atau interpretasi yang tidak selalu tepat dan relevan. Di sinilah letak muatan psikologis pentingnya penerapan "syari'at Islam" bagi masyarakat Muslim. Dan ini juga yang menjadi bagian dari alasan mengapa penerapan syari'at Islam di Aceh akan sangat menentukan masa depan daerah ini (Ismail, 2007: 6).

Dalam Islam, syariah (“cara” atau “jalan”) sering diartikan sebagai seperangkat standar yang mengatur semua aspek kehidupan, dari kepatuhan agama, perbankan, hingga tingkah laku sosial yang selayaknya, yang pada intinya bersumber dari Quran, kitab utama agama Islam, dan hadist, kumpulan peribahasa dan penjelasan tentang sunah, atau teladan dan aturan normatif, dari Nabi Muhammad.

Tetapi, tidak ada penafsiran tunggal atas Syariah di antara umat Muslim di seluruh dunia, terdapat berbagai perbedaan dalam penafsiran para ahli Islam tentang teladan kenabian yang mana yang asli dan keabsahan atau kelayakan menerapkan ayat-ayat tertentu secara harafiah di era modern ini. Pada awal tahun 1999, Pemerintah Indonesia dan Aceh mengadopsi pendekatan penerapan syariah yang menekankan pada tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa semua orang memenuhi kewajiban agamanya yang berasal dari Islam (Human Right Watch, 17).

Reformasi membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan syariat Islam (Amal, 2004: 25), sesuai dengan keistimewaan Aceh. Pemerintah Pusat merespon berbagai tuntutan itu dengan mengundang Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pelaksanaan syariat Islam memperoleh dasar hukum pasca reformasi tahun 1998. Tepatnya tahun 2001, melalui UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan tanggal 9 Agustus 2001 (Marzuki Abubakar, 152). Serta UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disingkat dengan UUPA) diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam konteks politik hukum, berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan hukum ke arah hukum yang baru pasca lahirnya undang-undang dimaksud, belum banyak dapat dihasilkan (Saidurrahman, 2010: 805).

Pro-kontra penerapan syariat Islam di Aceh tidak semudah seperti apa yang dibayangkan, salah satunya karena masih adanya kontroversi di kalangan masyarakat Aceh sendiri (Baihaqi, 2014). Munculnya polemik di level pemikiran para intelektual muda Aceh, merupakan realitas yang cukup positif bagi pencerdasan masyarakat Aceh untuk mendalami keberadaan Islam baik dalam tataran pemikiran maupun terapannya di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Keragaman pendapat justru membawa rahmat tersendiri sepanjang masih dapat saling menghargai perbedaan di antara masing-masing pandangan. Perbedaan pendapat menyangkut syariat Islam, sebenarnya tidak hanya terjadi di Aceh, secara umum perbedaan pandangan telah muncul di kalangan umat Islam. Hanya saja, karena Aceh yang notabene secara hukum diberikan status khusus, pro-kontra penerapan syariat Islam menjadi lebih mengemuka.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak (Pasal 125 ayat (1)). Syariat Islam tersebut meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketentuan mengenai pelaksanaan Syariat Islam diatur dengan Qanun. Adapun yang dimaksud dengan Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 18 Tahun 2001, dikatakan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka

penyelenggaraan otonomi khusus. Jadi, Qanun adalah peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lege generalis* dan MA berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun (Hikmawati, 2008: 72).

#### **2.4.2. Perempuan Aceh dan Kekerasan**

Keadilan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia dan termasuk hak dasar korban, selain hak untuk memperoleh kebenaran dan pemulihan. Namun, apa itu keadilan, seperti apa dia diwujudkan dan bagaimana cara pemenuhannya, adalah sesuatu yang terus menjadi perdebatan oleh penegak hukum, kalangan aktivis hak asasi manusia, dan juga tak terkecuali kelompok elit di masyarakat, penguasa dan bahkan, para pembuat peraturan dan kebijakan. Sebaliknya, orang-orang yang menjalani proses mencari keadilan baik sebagai korban maupun tertuduh, pendapat mereka mengenai bentuk keadilan yang mereka inginkan justru seringkali tidak didengarkan. Apalagi perempuan korban, suara mereka hampir tidak pernah diperhitungkan.

Perempuan Aceh banyak mengalami ketidakadilan. Pemerintahan belum bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan hak azasi manusia. Bagi perempuan korban, pengungkapan kebenaran dan proses peradilan haruslah independen, transparan dan bermartabat. Perempuan korban harus memperoleh jaminan perlindungan untuk dapat menceritakan kekerasan, khususnya seksual, yang

dialaminya secara terbuka. Korban membutuhkan bantuan pemulihan berbentuk fasilitas dan modal usaha serta rehabilitasi fisik, psikis dan sosial. Pada prakteknya, perjuangan perempuan korban untuk keadilan selalu berhadapan dengan kepentingan politik yang enggan mengungkapkan kebenaran, berlarutnya korupsi di dalam sistem peradilan, praktek arogansi penegak hukum, sistem kontrol pemerintah yang lemah, pemandulan pemikiran yang kritis terhadap tafsir agama, dan budaya menyalahkan korban.

Dalam laporan pelapor khusus untuk Aceh yang diterbitkan oleh komnas perempuan memuat adanya jurang atas rasa keadilan bagi perempuan ini adalah temuan dokumen terhadap 103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersebar di tiga belas kota/ kabupaten di Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Kasus-kasus ini terjadi pada masa operasi militer ( $\leq 1999$ , 2 kasus), masa dialog damai (2000-Mei 2003, 14 kasus), masa Darurat Militer dan Darurat Sipil (Mei 2003 – Agustus 2005, 65 kasus), Pasca MoU Damai ( $\geq$ Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode. Total 103 kasus ini sungguh-sungguh hanyalah pucuk kecil dari timbunan kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh.

Lebih dari setengah kasus yang terdokumentasi adalah kasus kekerasan seksual (59 persen, 61 kasus), yang terdiri dari 31 kasus perkosaan, 11 kasus penyiksaan seksual, 7 kasus perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi bernuansa seksual, 4 kasus penganiayaan seksual, dan 8 kasus eksploitasi seksual. Sementara empat puluh dua kasus non seksual mengambil terdiri dari

penyiksaan (32 kasus), perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi (9 kasus) dan penganiayaan (1 kasus) (Komnas Perempuan, 2007: i).

Tujuh puluh enam dari 128 pelaku kekerasan adalah aparat negara, khususnya dalam bentuk penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, terhadap perempuan yang dituduh makar/anggota *inong balee*, menjadi istri GAM atau memiliki anggota keluarga GAM. Tiga kasus penghukuman tidak manusiawi dilakukan oleh GAM terhadap istri/pacar TNI. Delapan belas orang korban adalah anak, korban termuda berusia 7 tahun yang diperkosa secara berulang-ulang oleh tetangganya. Lebih dari setengah korban berstatus menikah, namun untuk kasus kekerasan seksual 32 dari 61 kasus dialami oleh korban yang belum menikah. Kekerasan perempuan di Aceh, khususnya penyiksaan seksual dan perlakuan kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan strategi penundukan oleh pihak-pihak yang bertikai dan sebagai sarana perebutan kekuasaan politik pasca konflik. Penyiksaan seksual dilakukan dengan keji, termasuk didalamnya perkosaan dan pengrusakan alat seksual, fungsi reproduksi dan seksualitas perempuan.

Hukum militer sendiri cenderung menyalahkan korban. Di Aceh, kasus perkosaan belum menjadi perhatian khusus untuk diproses secara hukum. Bahkan jika korban pergi ke pengadilan, hasilnya tidak memuaskan bagi korban. Dengan perjuangan perempuan untuk pembelaan perempuan di daerah konflik Presiden Bambang Susilo Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 18, 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak-anak selama civil conflict.

keputusan tersebut akhirnya dan secara resmi ditempatkan isu keamanan perempuan dalam agenda pemerintah pusat dan daerah karena kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Praktek pelaksanaan ketentuan daerah tentang Syariat Islam di Aceh menyudutkan perempuan akibat penerapan hukum yang sewenang-wenang dan mengandung bentuk hukuman yang tidak manusiawi, terlebih karena menyebabkan penghukuman berlarut-larut pasca eksekusi. Kritik korban terhadap kesewenangan dibungkam dengan tuduhan sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan.

Pembungkaman serupa dihadapi oleh korban penganiayaan seksual lewat Kawin Cinta Buta. Dengan menggunakan justifikasi agama, praktek budaya ini adalah bentuk penganiayaan seksual yang sangat keji dan membuka peluang terjadinya perdagangan perempuan korban perkosaan dengan memaksanya menikah dengan pelaku. Paksaan yang berakar pada ideologi patriarki tentang “kesucian perempuan” berakibat pada kukuhnya posisi subordinat perempuan dan peluang terjadinya kekerasan baru terhadap korban. Eksploitasi seksual dilakukan dengan modus ingkar janji untuk menikahi pasca hubungan seksual ataupun sekedar menikahi secara siri untuk kemudian ditinggalkan. Pelaku adalah aparat negara yang menggunakan status dan posisinya sebagai figur keamanan untuk memperdaya korban. Ini adalah tindak eksploitasi seksual khas daerah konflik bersenjata di Indonesia, termasuk di Aceh. Impunitas terhadap korban dikukuhkan dengan penolakan institusi atas tanggung jawab komando dan pembungkaman korban oleh keluarga dan masyarakat karena dianggap sebagai aib.